



METODE STATISTIK SOSIAL DAN TATA KELOLA DATA DALAM PERSPEKTIF ILMU SOSIAL

Maulana

Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi, Indonesia

maulana@iaimajambi.ac.id

Evi Sulistia Wati

Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi, Indonesia

Email Korespondensi: evisulistiawati5@gmail.com

Mastikawati

Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi, Indonesia

mastikaika333@gmail.com

Rama Juni Pratama Putra

Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi, Indonesia

ramajpputra@gmail.com

Hajrul Aswat

Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi, Indonesia

hijrulaswad883@gmail.com

Sumarni

Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi, Indonesia

ifalpiani3@gmail.com

Received: 18 Juni 2026

Accepted: 20 Juli 2026

Published: 29 Juli 2026

Abstrak

Tata kelola pemerintahan daerah masih menghadapi tantangan berupa fragmentasi data, lemahnya integrasi antara kajian akademik dan praktik kebijakan, serta belum optimalnya pemanfaatan statistik sosial dalam pengambilan keputusan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memperkuat pemahaman dan penerapan tata kelola pemerintahan berbasis data melalui Seminar Internasional LOGIC 2025 bertema *Social Statistics Methods and Data Governance in Social Sciences Perspective*. Kegiatan dilaksanakan pada 15–16 Juli 2025 di Universitas Jambi melalui pemaparan kebijakan, diskusi interaktif, pertukaran pengetahuan, dokumentasi kegiatan, dan pembentukan kemitraan kelembagaan. Peserta kegiatan melibatkan unsur pemerintah daerah, akademisi, praktisi kebijakan, dan mitra internasional. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan kebijakan berbasis bukti telah diterapkan dalam penyusunan lebih dari 300 Peraturan



Wali Kota Jambi, pengembangan transformasi digital pemerintahan, pemanfaatan data demografi, serta pelaksanaan program pembangunan inklusif. Kegiatan ini juga menghasilkan kerja sama formal antara Pemerintah Kota Jambi dan Universitas Jambi yang ditindaklanjuti dengan pembentukan Laboratorium Kebijakan Pemerintahan. Kolaborasi tersebut memperkuat legitimasi ilmiah kebijakan daerah, memperluas jejaring akademik internasional, dan menyediakan ruang berkelanjutan bagi penelitian serta evaluasi kebijakan. Seminar ini menegaskan bahwa integrasi statistik sosial, tata kelola data, dan kolaborasi pemerintah dengan perguruan tinggi menjadi fondasi penting bagi pelayanan publik yang transparan, adaptif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Statistik Sosial, Tata Kelola Data, Kebijakan Berbasis Bukti, Transformasi Digital, Kolaborasi Kelembagaan.

Abstract

Local government governance continues to face challenges related to fragmented data, limited integration between academic research and policy practice, and the inadequate use of social statistics in decision-making. This community service activity aimed to strengthen the understanding and implementation of data-driven governance through the LOGIC 2025 International Seminar entitled *Social Statistics Methods and Data Governance in Social Sciences Perspective*. The seminar was held on 15-16 July 2025 at Universitas Jambi through policy presentations, interactive discussions, knowledge exchange, activity documentation, and institutional partnership development. Participants included local government representatives, academics, policy practitioners, and international partners. The results indicate that evidence-based policymaking has been applied in the formulation of more than 300 Jambi mayoral regulations, government digital transformation, the use of demographic data, and the implementation of inclusive development programs. The activity also produced a formal partnership between the Jambi City Government and Universitas Jambi, followed by the establishment of a Government Policy Laboratory. This collaboration strengthened the scientific legitimacy of regional policies, expanded international academic networks, and provided a sustainable platform for policy research and evaluation. The seminar confirms that the integration of social statistics, data governance, and government with university collaboration constitutes an important foundation for transparent, adaptive, and sustainable public services.

Keywords: Social Statistics, Data Governance, Evidence-Based Policy, Digital Transformation, Institutional Collaboration.

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah menjadikan data sebagai sumber daya strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun, praktik kebijakan masih menghadapi fragmentasi data, perbedaan standar antarinstansi, keterbatasan interoperabilitas, serta kecenderungan pengambilan keputusan yang belum sepenuhnya bertumpu pada bukti. Persoalan ini krusial karena data yang tidak akurat, tidak mutakhir, dan tidak terhubung dapat menghasilkan program yang tumpang tindih, pemborosan anggaran, serta pelayanan publik yang kurang responsif. Pemerintah Indonesia telah meresponsnya melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun (2018) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,



Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun (2019) tentang Satu Data Indonesia, dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun (2023) tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Pada tingkat global, tata kelola data dipandang sebagai prasyarat agar pemerintah mampu menggunakan data secara aman, etis, dan efektif untuk menciptakan nilai publik (OECD, 2019). Secara akademik, isu ini penting untuk menjelaskan hubungan antara statistik sosial, transformasi digital, dan kualitas kebijakan. Secara praktis, isu tersebut menentukan kemampuan pemerintah daerah membangun layanan yang transparan, adaptif, dan berkelanjutan.

Kajian terdahulu telah membahas isu tersebut melalui beberapa arah. Literatur tata kelola data menekankan standar, interoperabilitas, keamanan, kualitas, dan pemanfaatan data sepanjang siklusnya sebagai dasar pengambilan keputusan (World Bank, 2021). Studi transformasi digital menunjukkan bahwa digitalisasi sektor publik bukan sekadar memindahkan layanan manual ke sistem daring, melainkan mengubah proses organisasi, budaya birokrasi, kompetensi aparatur, dan hubungan pemerintah dengan masyarakat (Mergel et al., 2019a). Kajian kebijakan berbasis bukti juga menegaskan pentingnya data empiris, penelitian, dan evaluasi dalam perumusan kebijakan, tetapi menemukan hambatan berupa lemahnya interaksi antara peneliti dan pembuat kebijakan, resistensi institusional, keterbatasan infrastruktur data, serta penggunaan bukti yang tidak konsisten (Suazo-Galdames et al., 2025). Meskipun demikian, penelitian sebelumnya lebih banyak membahas tata kelola data, transformasi digital, dan kolaborasi ilmu-kebijakan secara terpisah. Masih terbatas kajian yang menjelaskan bagaimana forum pengabdian kepada masyarakat dapat mempertemukan pemerintah, perguruan tinggi, dan mitra internasional sekaligus menghasilkan tindak lanjut kelembagaan yang mendukung penelitian, pengembangan kapasitas, serta evaluasi kebijakan daerah secara berkelanjutan.

Tulisan ini merespons kekurangan tersebut dengan menganalisis Seminar Internasional LOGIC 2025 sebagai praktik pengabdian kepada masyarakat yang menghubungkan pengetahuan akademik dengan pengalaman tata kelola Pemerintah Kota Jambi. Secara khusus, tulisan ini bertujuan menjelaskan bagaimana metode statistik sosial dan tata kelola data digunakan sebagai kerangka untuk memahami kebijakan berbasis bukti, transformasi digital pemerintahan, pemanfaatan bonus demografi, dan pembangunan inklusif (Bappenas & UNFPA, 2023). Analisis juga diarahkan pada peran Wali Kota Jambi sebagai narasumber utama dalam menyampaikan pengalaman penyusunan lebih dari 300 Peraturan Wali Kota, pemanfaatan data kependudukan dan pembangunan, serta pelaksanaan program Kartu Bahagia dan Kampung Bahagia. Selain menelaah substansi seminar, tulisan ini mengevaluasi capaian kolaboratif berupa penandatanganan *Memorandum of Agreement* dan *Implementation Agreement* antara Pemerintah Kota Jambi dan Universitas Jambi serta pembentukan Laboratorium Kebijakan



Pemerintahan. Dengan cara tersebut, kegiatan tidak dinilai hanya berdasarkan terselenggaranya forum, tetapi berdasarkan kemampuannya menghasilkan pertukaran pengetahuan, legitimasi ilmiah, jaringan internasional, dan mekanisme kelembagaan untuk mendukung perumusan serta evaluasi kebijakan secara berkelanjutan.

Argumen utama tulisan ini adalah bahwa kualitas tata kelola pemerintahan daerah meningkat ketika data yang valid dan terintegrasi dihubungkan dengan kapasitas kepemimpinan, transformasi organisasi, dan kolaborasi pemerintah dengan perguruan tinggi. Hubungan tersebut bekerja melalui tiga mekanisme. Pertama, statistik sosial dan tata kelola data menyediakan dasar objektif untuk mengidentifikasi masalah, menentukan kelompok sasaran, menyusun regulasi, dan mengevaluasi hasil kebijakan. Kedua, transformasi digital mempercepat pengolahan serta pertukaran informasi, tetapi hanya menghasilkan perbaikan apabila disertai perubahan proses bisnis, kompetensi aparatur, keamanan data, dan budaya kerja (Mergel et al., 2019b). Ketiga, kolaborasi dengan perguruan tinggi memperkuat validasi metodologis, membuka ruang kritik, dan menjaga kesinambungan evaluasi kebijakan sesuai orientasi kolaborasi pentahelix (Kemenko, 2024). Berdasarkan argumen tersebut, keikutsertaan kepala daerah dalam forum akademik akan memberikan dampak substantif apabila pengetahuan yang dipertukarkan diterjemahkan menjadi agenda kelembagaan, riset bersama, dan mekanisme tindak lanjut. Karena artikel ini bersifat deskriptif, rumusan tersebut diposisikan sebagai proposisi konseptual, bukan hipotesis statistik. Pembentukan Laboratorium Kebijakan Pemerintahan karena itu menjadi solusi yang mengubah seminar dari kegiatan seremonial menjadi infrastruktur kolaborasi kebijakan berbasis bukti.

LANDASAN TEORI

Landasan teori mengenai statistik sosial, tata kelola data, dan kebijakan publik menunjukkan bahwa hubungan antara kualitas data, kapasitas organisasi, transformasi digital, dan penggunaan bukti telah dibahas melalui tiga kecenderungan utama. Kecenderungan pertama menempatkan tata kelola data sebagai fondasi sektor publik berbasis data, dengan perhatian pada kualitas, standardisasi, interoperabilitas, keamanan, akses, dan penggunaan data untuk menciptakan nilai publik. Kecenderungan kedua memandang transformasi digital sebagai perubahan menyeluruh pada proses bisnis, struktur, budaya birokrasi, kompetensi aparatur, dan pola pelayanan, bukan sekadar pengalihan dokumen manual ke sistem daring. Kecenderungan ketiga mengkaji kebijakan berbasis atau terinformasi bukti serta kolaborasi pemerintah dengan perguruan tinggi sebagai mekanisme yang menghubungkan riset, data administratif, pertimbangan pemangku kepentingan, dan keputusan politik. Ketiga arus tersebut menegaskan bahwa data tidak otomatis menghasilkan kebijakan yang baik serta manfaatnya bergantung pada



tata kelola, kesiapan kelembagaan, kemampuan analitis, dan relasi antarpelaku. Dalam naskah ini, ketiga kecenderungan tersebut bertemu pada Seminar Internasional LOGIC 2025, yang menghubungkan statistik sosial, transformasi digital, pengalaman Pemerintah Kota Jambi, dan kemitraan akademik dalam satu forum pengabdian kepada masyarakat.

Kecenderungan pertama berorientasi pada tata kelola data dan pembentukan sektor publik berbasis data. Fokus kajian ini mencakup aturan kelembagaan, standar data, siklus pengumpulan dan pemanfaatan, interoperabilitas, keamanan, serta kapasitas pemerintah mengubah data menjadi nilai publik. OECD (2020) mengembangkan kerangka sektor publik berbasis data dengan menekankan tata kelola, penerapan data dalam siklus kebijakan, dan peran data dalam membangun kepercayaan. World Bank menambahkan bahwa pemanfaatan data harus diseimbangkan dengan perlindungan hak, kualitas sistem statistik, keterbukaan yang bertanggung jawab, dan kemampuan berbagi data secara aman. Pada tingkat organisasi, Klievink et al (2017) menggunakan kajian konseptual dan pengembangan kerangka kesiapan untuk menunjukkan bahwa potensi data berskala besar tidak akan tercapai tanpa sumber daya, tata kelola, teknologi, dan kemampuan manajerial yang memadai. Pola penelitian ini umumnya menggunakan analisis kebijakan, perbandingan lintas negara, penilaian kematangan, dan studi kesiapan organisasi. Kontribusinya adalah memperjelas prasyarat teknis dan institusional pengambilan keputusan berbasis data, tetapi orientasinya sering berada pada arsitektur data dan kapasitas sistem, belum pada proses pertukaran pengetahuan dalam forum kolaboratif daerah.

Kecenderungan kedua berfokus pada transformasi digital sektor publik sebagai perubahan organisasi yang multidimensi. Mergel et al (2019), melalui wawancara ahli, menunjukkan bahwa transformasi digital melampaui digitalisasi layanan karena menyangkut perubahan proses, hubungan antarlembaga, pola kerja, dan penciptaan nilai publik. Vial (2019), melalui tinjauan literatur dan penyusunan agenda riset, menempatkan teknologi digital sebagai pemicu perubahan strategis yang memengaruhi struktur organisasi, sumber daya, jalur penciptaan nilai, dan respons terhadap hambatan internal maupun eksternal. Penelitian dalam pola ini banyak menggunakan wawancara, studi kasus, tinjauan sistematis, evaluasi kematangan digital, dan analisis perubahan organisasi. Temuannya relatif konsisten bahwa teknologi tidak menghasilkan efisiensi secara otomatis; dampaknya ditentukan oleh kepemimpinan, kompetensi pegawai, integrasi proses, tata kelola informasi, dan kesiapan budaya kerja. Perspektif ini relevan dengan paparan transformasi digital Pemerintah Kota Jambi dalam LOGIC 2025. Namun, sebagian besar kajian transformasi digital berorientasi pada perubahan internal birokrasi dan layanan, sehingga belum selalu menjelaskan bagaimana forum akademik, statistik sosial, dan



kemitraan perguruan tinggi dapat memperkuat pembelajaran kebijakan serta legitimasi ilmiah transformasi tersebut.

Kecenderungan ketiga mengkaji kebijakan terinformasi bukti dan kolaborasi strategis antara pemerintah, akademisi, serta pemangku kepentingan. Head (2016) menegaskan bahwa penggunaan bukti perlu dilembagakan melalui investasi jangka panjang pada data, evaluasi, keterampilan analitis, dan hubungan dengan sumber keahlian di luar pemerintah. Parkhurst (2016) memperluas perdebatan dengan menunjukkan bahwa bukti tidak pernah sepenuhnya netral karena pemilihan, penafsiran, dan penggunaannya berlangsung dalam konteks nilai, kepentingan, serta kekuasaan; karena itu, yang diperlukan bukan hanya lebih banyak bukti, tetapi tata kelola bukti yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kajian kolaborasi pemerintah dengan universitas menggunakan studi kasus dan metode campuran untuk mengidentifikasi pentingnya tujuan bersama, keluaran yang jelas, kepercayaan, struktur formal, dan kesinambungan kerja sama. Penelitian mengenai laboratorium kebijakan dan kolaborasi publik juga menunjukkan bahwa ruang eksperimental dapat mempertemukan pengetahuan akademik, kebutuhan pemerintah, dan partisipasi masyarakat. Pola ini paling dekat dengan naskah karena LOGIC 2025 menghasilkan perjanjian kerja sama dan Laboratorium Kebijakan Pemerintahan, tetapi literatur umumnya menilai kolaborasi sebagai proyek riset atau inovasi, bukan sebagai keluaran konkret kegiatan pengabdian berbasis seminar internasional.

Ketiga kecenderungan tersebut memberikan fondasi yang kuat, tetapi masih belum memperhatikan integrasi proses dari produksi data hingga pelembagaan tindak lanjut kebijakan pada tingkat pemerintah daerah. Literatur tata kelola data cenderung menekankan standar, keamanan, dan interoperabilitas; literatur transformasi digital menyoroti teknologi, organisasi, dan kompetensi; sedangkan kajian kebijakan terinformasi bukti serta kolaborasi lebih banyak membahas penggunaan riset, hubungan antarlembaga, dan desain ruang inovasi. Pemisahan tersebut menyebabkan keterhubungan antara statistik sosial, komunikasi pengetahuan, kepemimpinan daerah, transformasi digital, pemanfaatan bonus demografi, pembangunan inklusif, dan pembentukan lembaga kolaboratif belum dijelaskan dalam satu rangkaian analitis. Selain itu, penelitian terdahulu jarang menempatkan seminar internasional sebagai intervensi pengabdian kepada masyarakat yang dapat menghasilkan lebih dari pertukaran gagasan, yakni legitimasi ilmiah kebijakan, perjanjian kerja sama, jaringan internasional, dan laboratorium kebijakan. Kebaruan tulisan ini terletak pada pembacaan kegiatan LOGIC 2025 sebagai proses penghubung ilmu dan kebijakan yang bergerak dari pemaparan bukti, dialog lintas aktor, peneguhan komitmen, hingga pembentukan infrastruktur kelembagaan untuk riset dan evaluasi berkelanjutan.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, tulisan ini menawarkan arah baru dengan menganalisis tata kelola data sebagai ekosistem pengetahuan dan kebijakan, bukan semata-



mata sistem teknis pengelolaan informasi. Fokusnya diarahkan pada bagaimana statistik sosial, data administratif, kerangka akademik, pengalaman kepemimpinan daerah, dan dialog internasional dipertemukan dalam LOGIC 2025 untuk menghasilkan pembelajaran bersama serta tindak lanjut kelembagaan. Perspektif ini menempatkan Pemerintah Kota Jambi bukan hanya sebagai pengguna data, Universitas Jambi bukan hanya sebagai penyedia teori, dan seminar bukan hanya sebagai acara penyampaian materi, melainkan sebagai ruang produksi pengetahuan bersama. Analisis secara khusus menelusuri hubungan antara paparan kebijakan berbasis bukti, transformasi digital, pemanfaatan struktur demografi, program pembangunan inklusif, penandatanganan perjanjian kerja sama, dan pembentukan Laboratorium Kebijakan Pemerintahan. Arah baru tersebut menghasilkan proposisi bahwa dampak forum akademik terhadap tata kelola daerah akan semakin kuat apabila pertukaran pengetahuan dilembagakan menjadi riset bersama, mekanisme evaluasi, peningkatan kapasitas aparatur, dan akses partisipatif bagi pemangku kepentingan. Dengan demikian, ukuran keberhasilan tidak berhenti pada penyelenggaraan seminar, tetapi pada keberlanjutan perubahan organisasi dan penggunaan bukti dalam siklus kebijakan.

METODE PENELITIAN

Unit analisis penelitian ini adalah peristiwa dan proses kolaborasi kelembagaan yang berlangsung dalam Seminar Internasional LOGIC 2025 bertema *Social Statistics Methods and Data Governance in Social Sciences Perspective*. Fokus analisis diarahkan pada pelaksanaan seminar tanggal 15–16 Juli 2025 di Universitas Jambi, pemaparan kebijakan oleh Wali Kota Jambi, dialog antara pemerintah dan akademisi, penandatanganan perjanjian kerja sama, serta pembentukan Laboratorium Kebijakan Pemerintahan. Dengan demikian, individu seperti Wali Kota Jambi, pimpinan universitas, akademisi, dan mitra internasional tidak diperlakukan sebagai unit analisis yang berdiri sendiri, melainkan sebagai aktor yang membentuk proses pertukaran pengetahuan dan kolaborasi kebijakan. Analisis juga mencakup substansi kebijakan yang dipresentasikan, yaitu penyusunan lebih dari 300 Peraturan Wali Kota berbasis kajian, transformasi digital pemerintahan, pemanfaatan data demografi, serta pelaksanaan program pembangunan inklusif. Penetapan peristiwa dan kolaborasi kelembagaan sebagai unit analisis memungkinkan penelitian menilai hubungan antara kegiatan akademik, penggunaan bukti, tata kelola data, dan terbentuknya mekanisme kerja sama berkelanjutan antara Pemerintah Kota Jambi dan Universitas Jambi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus evaluatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian tidak dimaksudkan untuk mengukur pengaruh kegiatan secara statistik, tetapi memahami proses pelaksanaan, substansi pengetahuan yang dipertukarkan, bentuk interaksi antarpemangku kepentingan,



dan capaian kelembagaan yang dihasilkan. Studi kasus digunakan karena Seminar Internasional LOGIC 2025 merupakan suatu kasus yang terikat oleh waktu, tempat, peserta, agenda, dan konteks tata kelola Pemerintah Kota Jambi. Cresswell & Poth (2017) menjelaskan bahwa studi kasus memungkinkan peneliti mengkaji suatu sistem terikat secara mendalam melalui berbagai sumber informasi, sedangkan Yin (2018) menekankan kegunaannya untuk memahami fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata. Orientasi evaluatif diterapkan dengan membandingkan tujuan kegiatan, materi yang disampaikan, proses dialog, dan keluaran yang dihasilkan. Desain ini memungkinkan kegiatan dinilai tidak hanya dari terselenggaranya seminar, tetapi juga dari kemampuannya memperkuat pemahaman kebijakan berbasis bukti, membangun kolaborasi pemerintah dengan perguruan tinggi, dan menghasilkan tindak lanjut berupa Laboratorium Kebijakan Pemerintahan.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer berbentuk hasil pengamatan kegiatan dan data sekunder berbentuk dokumen, teks, serta materi visual. Data primer bersumber dari proses seminar, pemaparan narasumber, sambutan pejabat, dialog interaktif, dan proses penandatanganan kerja sama yang diamati selama kegiatan. Data tersebut memuat informasi mengenai kebijakan berbasis bukti, tata kelola data, transformasi digital, kondisi demografi, pembangunan inklusif, dan kolaborasi kelembagaan. Data sekunder berasal dari susunan acara, materi presentasi Wali Kota Jambi, dokumen perjanjian kerja sama, catatan kegiatan, dokumentasi foto, tabel capaian, serta informasi mengenai pembentukan Laboratorium Kebijakan Pemerintahan. Penelitian juga menggunakan peraturan dan literatur sebagai sumber kontekstual, terutama Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 (2018), Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun (2019), laporan kelembagaan, dan artikel ilmiah mengenai transformasi digital serta tata kelola data. Naskah sumber tidak menjelaskan pelaksanaan wawancara individual, survei, atau penyebaran kuesioner. Oleh karena itu, pernyataan peserta dalam forum diperlakukan sebagai data dialog publik, bukan sebagai hasil wawancara penelitian. Penggunaan sumber yang beragam memungkinkan substansi kegiatan, capaian, dan landasan kebijakannya diperiksa secara silang.

Pengumpulan data dilaksanakan melalui tiga proses, yaitu observasi kegiatan, pencatatan dialog, dan dokumentasi. Pada tahap awal, peneliti mengidentifikasi tujuan, tema, agenda, narasumber, dan keluaran yang direncanakan dalam Seminar Internasional LOGIC 2025. Pada tahap pelaksanaan, observasi dilakukan terhadap penyampaian materi, respons peserta, diskusi antara pemerintah dan akademisi, serta proses pembentukan komitmen kelembagaan. Pokok-pokok pemaparan dicatat secara sistematis, terutama informasi mengenai penyusunan regulasi berbasis data, jumlah dan komposisi penduduk, pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, program Kartu Bahagia dan



Kampung Bahagia, serta rencana kerja sama pemerintah dengan universitas. Dialog seminar dicatat untuk memperoleh gambaran mengenai pertukaran pandangan, tanggapan akademik, dan relevansi pengalaman Kota Jambi terhadap tata kelola data. Dokumentasi dilakukan dengan menghimpun materi presentasi, susunan acara, tabel kegiatan, foto, dokumen perjanjian kerja sama, dan bukti pembentukan Laboratorium Kebijakan Pemerintahan. Penggunaan berbagai sumber bukti merupakan ciri penting studi kasus karena membantu menghasilkan gambaran yang kontekstual dan mengurangi ketergantungan pada satu jenis data. Seluruh data kemudian disusun berdasarkan waktu, sumber, dan tema agar mudah dianalisis.

Analisis data mengikuti model interaktif melalui kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Model ini digunakan karena mendukung analisis data kualitatif secara berulang dan penyajian temuan dalam bentuk data yang disajikan dalam tabel maupun narasi. Pada tahap kondensasi, catatan observasi, materi presentasi, dialog, dokumen kerja sama, dan data visual dibaca serta diseleksi berdasarkan relevansinya dengan tujuan kegiatan. Selanjutnya dilakukan pengodean secara deduktif dan induktif. Kode deduktif mengacu pada enam konsep yang digunakan dalam naskah, yaitu kebijakan berbasis bukti, tata kelola data, transformasi digital, kolaborasi pentahelix, bonus demografi, dan pembangunan inklusif. Kode induktif dikembangkan dari capaian kegiatan, seperti legitimasi akademik, jejaring internasional, komitmen kelembagaan, dan keberlanjutan evaluasi kebijakan. Data kemudian disajikan dalam bentuk tabel data yang menghubungkan konsep, bentuk penerapan, dan indikator keberhasilan, sebagaimana tergambar pada tabel. Kesimpulan diverifikasi dengan membandingkan materi pemaparan, dokumentasi kegiatan, tabel capaian, dan dokumen kerja sama. Analisis tematik dilakukan secara reflektif agar tema memiliki batas yang jelas dan tetap terhubung dengan data sumber.

RESULTS AND DISCUSSION

Result

Transformasi Menuju Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Data

Data kegiatan menunjukkan adanya perubahan orientasi tata kelola Pemerintah Kota Jambi dari administrasi yang bertumpu pada rutinitas menuju pengambilan keputusan berbasis data. Bukti pertama berasal dari pemaparan Wali Kota Jambi berjudul "Tata Kelola Data dan Transformasi Digital di Kota Jambi" pada Seminar Internasional LOGIC 2025. Materi tersebut mencatat penyusunan lebih dari 300 Peraturan Wali Kota melalui kajian dan dukungan data, jumlah penduduk sebanyak 635.101 jiwa, proporsi 52% yang terdiri atas Generasi Alpha, Generasi Z, dan Generasi Milenial, pertumbuhan ekonomi sebesar 4,98%, serta Indeks Pembangunan Manusia sebesar 81,77. Bukti yang dilihat juga mencakup tabel



pada naskah yang menghubungkan kebijakan berbasis bukti dengan penyusunan regulasi, tata kelola data dengan konsistensi informasi lintas program, serta transformasi digital dengan efisiensi pelayanan publik. Dalam forum, Rektor Universitas Jambi menegaskan pentingnya data sebagai fondasi penelitian dan kebijakan modern, sedangkan penutupan kegiatan menempatkan tata kelola data sebagai tulang punggung administrasi publik. Data ini memperlihatkan bahwa statistik sosial telah digunakan untuk menjelaskan kondisi, menetapkan prioritas, dan menilai capaian pembangunan daerah.

Tabel 1. Bukti Transformasi Tata Kelola Berbasis Data

Data atau bukti	Bentuk penerapan	Makna terhadap tata kelola
Lebih dari 300 Peraturan Wali Kota	Penyusunan regulasi melalui kajian dan data	Penguatan kebijakan berbasis bukti
Penduduk 635.101 jiwa	Basis pemetaan kebutuhan masyarakat	Perencanaan berbasis kondisi sosial
Proporsi generasi muda 52%	Dasar kebijakan pemberdayaan pemuda	Pemanfaatan bonus demografi
Pertumbuhan ekonomi 4,98%	Indikator perkembangan ekonomi	Evaluasi capaian pembangunan
Indeks Pembangunan Manusia 81,77	Indikator kualitas pembangunan manusia	Pengukuran hasil pembangunan
Transformasi proses birokrasi	Penggunaan data dan teknologi	Peningkatan efisiensi pelayanan

Secara sederhana, temuan tersebut berarti bahwa data dalam kegiatan ini tidak diposisikan hanya sebagai angka pelengkap presentasi, melainkan sebagai dasar untuk menjelaskan mengapa suatu regulasi atau program diperlukan. Jumlah penduduk dan komposisi generasi digunakan untuk membaca struktur sosial Kota Jambi; angka pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia digunakan untuk menggambarkan capaian pembangunan; sedangkan penyusunan lebih dari 300 Peraturan Wali Kota dipresentasikan sebagai bentuk penerapan kebijakan berbasis bukti. Pernyataan ulang ini penting karena klaim mengenai pemerintahan berbasis data harus dibedakan dari sekadar penggunaan perangkat digital. Tata kelola berbasis data baru terlihat ketika informasi dikumpulkan, diperiksa, ditafsirkan, dan diterjemahkan menjadi pilihan



kebijakan. Dalam kerangka OECD (2019), sektor publik berbasis data menempatkan data sebagai aset bagi perumusan kebijakan, pelayanan, manajemen organisasi, dan inovasi. Dengan demikian, materi seminar memperlihatkan upaya menghubungkan data sosial, regulasi, program, dan evaluasi. Namun, naskah belum menyajikan dokumen kajian untuk setiap peraturan maupun pengukuran dampak kausalnya. Temuan ini karena itu menunjukkan arah transformasi dan praktik yang dilaporkan, bukan verifikasi menyeluruh terhadap efektivitas seluruh regulasi.

Deskripsi terhadap bukti pertama menghasilkan empat pola. Pertama, terdapat kecenderungan institusionalisasi penggunaan data melalui penyusunan regulasi yang diklaim didukung kajian, sehingga bukti ditempatkan pada tahap formulasi kebijakan. Kedua, statistik sosial digunakan secara diagnostik untuk membaca demografi, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan manusia, bukan hanya untuk pelaporan administratif. Ketiga, transformasi digital dipahami sebagai perubahan tata kelola dan proses birokrasi, sejalan dengan pandangan bahwa digitalisasi sektor publik mencakup perubahan proses, struktur kerja, dan penciptaan nilai, bukan sekadar migrasi layanan ke media elektronik. Keempat, indikator makro dipakai sebagai perangkat legitimasi untuk menjelaskan keberhasilan serta arah kebijakan daerah. Keempat pola tersebut menunjukkan tren menuju pemerintahan yang lebih terukur, tetapi juga menimbulkan kebutuhan akan transparansi metodologis: sumber data, tahun pengukuran, definisi indikator, dan mekanisme evaluasi perlu ditampilkan agar klaim kebijakan dapat diuji. Kesimpulan hasil pertama ialah bahwa LOGIC 2025 berhasil memvisualisasikan hubungan antara statistik sosial, tata kelola data, dan keputusan pemerintah, sekaligus membuka ruang akademik untuk menilai kualitas penggunaan bukti dalam siklus kebijakan daerah.

Institusionalisasi Kolaborasi Pemerintah dan Perguruan Tinggi

Bukti kedua menunjukkan terjadinya perubahan dari pertukaran pengetahuan yang bersifat temporer menuju kolaborasi kelembagaan yang lebih formal. Data yang dilihat pada rangkaian hari kedua ialah penandatanganan *Memorandum of Agreement* dan *Implementation Agreement* antara Pemerintah Kota Jambi dan Universitas Jambi. Dokumen kegiatan menyebutkan bahwa kerja sama tersebut ditindaklanjuti dengan pembentukan Laboratorium Kebijakan Pemerintahan sebagai wadah riset kebijakan berbasis data. Data yang didengar selama forum mencakup pertukaran gagasan antara Wali Kota Jambi, akademisi Indonesia, dan akademisi dari Slovenia mengenai tata kelola data, statistik sosial, serta relevansi pengalaman lokal terhadap standar internasional. Data yang dibaca pada tabel menempatkan kolaborasi pentahelix dalam bentuk perjanjian kerja sama dan menggunakan terbentuknya laboratorium sebagai indikator keberhasilan. Naskah juga mencatat terjalinnya jejaring dengan University of Ljubljana untuk peluang pengembangan



riset kebijakan lanjutan. Bukti tersebut memperlihatkan bahwa keluaran kegiatan tidak berhenti pada seminar, tetapi mencakup struktur kerja sama yang berpotensi menghubungkan data pemerintah, kapasitas akademik, riset mahasiswa dan dosen, serta kebutuhan evaluasi kebijakan daerah.

Tabel 2. Tahapan Institusionalisasi Kolaborasi

Tahapan	Bukti kegiatan	Keluaran yang diharapkan
Pertukaran pengetahuan	Pemaparan dan diskusi internasional	Kesamaan pemahaman mengenai tata kelola data
Pembentukan komitmen	Dialog pemerintah dan akademisi	Identifikasi kebutuhan kolaborasi
Formalisasi	Penandatanganan MoA dan IA	Dasar hukum pelaksanaan kerja sama
Institusionalisasi	Laboratorium Kebijakan Pemerintahan	Riset dan evaluasi kebijakan berkelanjutan
Internasionalisasi	Jejaring dengan akademisi Slovenia	Pertukaran pengetahuan dan publikasi bersama

Temuan itu dapat dinyatakan kembali sebagai pergeseran dari hubungan pemerintah dengan universitas yang berbasis acara menuju hubungan yang memiliki dasar kelembagaan. Seminar menyediakan ruang awal untuk memperkenalkan masalah, konsep, data, dan pengalaman kebijakan, sedangkan perjanjian kerja sama memberikan legitimasi formal bagi kegiatan bersama. Laboratorium Kebijakan Pemerintahan kemudian diposisikan sebagai mekanisme operasional yang dapat menerjemahkan komitmen menjadi riset, evaluasi, penyusunan rekomendasi, pengembangan kompetensi, dan pembelajaran kebijakan. Dengan kata lain, penandatanganan dokumen bukan hasil akhir, melainkan pintu masuk menuju produksi pengetahuan bersama. Pemaknaan ini sejalan dengan literatur kebijakan terinformasi bukti yang menekankan pentingnya melembagakan evaluasi dan membangun hubungan berkelanjutan antara lembaga pemerintah dan sumber keahlian di luar pemerintah. Akan tetapi, naskah belum menjelaskan struktur organisasi laboratorium, sumber pendanaan, mekanisme akses data, agenda riset, indikator kinerja, dan jadwal tindak lanjut. Karena itu, bukti yang tersedia cukup untuk menyatakan terbentuknya platform kolaborasi, tetapi belum cukup untuk menilai keberhasilan operasional atau dampaknya terhadap kualitas kebijakan dalam jangka panjang.



Deskripsi data menghasilkan empat kecenderungan dalam pola kolaborasi. Pertama, kolaborasi berkembang melalui tahapan dialog, kesepakatan formal, dan rencana institusionalisasi, sehingga terdapat jalur perubahan yang lebih jelas daripada kerja sama seremonial. Kedua, pemerintah berperan sebagai pemilik masalah dan data, sedangkan universitas berperan sebagai penyedia metodologi, analisis, dan validasi ilmiah. Ketiga, jejaring internasional memberi fungsi pembanding dan memperluas kemungkinan pertukaran metode, publikasi, serta praktik tata kelola. Keempat, laboratorium kebijakan berpotensi menjadi ruang perantara yang mengurangi jarak antara hasil riset dan kebutuhan administrasi daerah. Pola tersebut menegaskan bahwa kualitas kolaborasi tidak hanya ditentukan oleh jumlah aktor, tetapi oleh kejelasan tujuan, pembagian peran, akses terhadap data, dan keberlanjutan keluaran. Kesimpulan hasil kedua adalah bahwa LOGIC 2025 menghasilkan solusi kelembagaan yang relevan terhadap kesenjangan ilmu dan kebijakan. Namun, keberhasilannya harus diuji melalui tindakan setelah seminar, seperti penelitian bersama, evaluasi regulasi, publikasi ilmiah, pelatihan aparatur, pelibatan mahasiswa, serta penggunaan rekomendasi laboratorium dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Pemanfaatan Data Demografi untuk Pembangunan Inklusif

Bukti ketiga berkaitan dengan penggunaan data demografi dan pendekatan pembangunan inklusif sebagai dasar penetapan program. Materi Wali Kota Jambi menyebutkan bahwa 52% penduduk kota terdiri atas Generasi Alpha, Generasi Z, dan Generasi Milenial. Struktur tersebut dibaca sebagai peluang bonus demografi yang membutuhkan kebijakan pendidikan, pemberdayaan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Data program yang dibaca dalam naskah mencakup Kartu Bahagia dan Kampung Bahagia, yang dipresentasikan sebagai bentuk pembangunan inklusif untuk memperkuat kesejahteraan serta modal sosial masyarakat. Pada tabel, analisis penduduk usia produktif dihubungkan dengan strategi pemberdayaan generasi muda, sedangkan kedua program tersebut dikaitkan dengan peningkatan modal sosial dan kesejahteraan warga. Diskusi seminar juga menghubungkan capaian pertumbuhan ekonomi 4,98% dan Indeks Pembangunan Manusia 81,77 dengan kemampuan daerah mengelola potensi demografinya. Bukti ini menunjukkan bahwa statistik sosial berfungsi sebagai perangkat untuk mengenali kelompok sasaran dan merancang respons programatik. Meski demikian, naskah belum menyediakan data penerima manfaat, perubahan kondisi sebelum dan sesudah program, ataupun evaluasi distribusi manfaat antarkelompok masyarakat.



Tabel 3. Hubungan Data Demografi dan Kebijakan Inklusif

Temuan data	Interpretasi kebijakan	Bentuk respons
Dominasi generasi muda sebesar 52%	Peluang bonus demografi	Pendidikan, keterampilan, dan pemberdayaan
Pertumbuhan ekonomi 4,98%	Perkembangan aktivitas ekonomi	Penguatan kesempatan produktif
Indeks Pembangunan Manusia 81,77	Capaian kualitas manusia	Peningkatan kualitas layanan sosial
Program Kartu Bahagia	Dukungan kesejahteraan warga	Pelayanan sosial yang lebih inklusif
Program Kampung Bahagia	Penguatan komunitas dan modal sosial	Pembangunan berbasis lingkungan warga

Pernyataan ulang atas hasil tersebut menunjukkan bahwa bonus demografi tidak dipahami sebagai keuntungan yang muncul secara otomatis dari besarnya jumlah penduduk muda. Potensi itu hanya berubah menjadi manfaat apabila pemerintah mampu memperluas pendidikan, kesehatan, partisipasi, keterampilan, dan kesempatan ekonomi. Oleh sebab itu, angka 52% digunakan sebagai sinyal kebijakan bahwa kelompok muda harus menjadi sasaran strategis pembangunan, bukan sekadar kategori statistik. Program Kartu Bahagia dan Kampung Bahagia kemudian ditempatkan sebagai contoh bagaimana data sosial diterjemahkan menjadi intervensi yang berorientasi pada kesejahteraan dan kehidupan komunitas. Perspektif pembangunan inklusif membantu menjelaskan bahwa keberhasilan tidak cukup diukur melalui pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melalui perluasan kemampuan warga untuk mengakses layanan dan berpartisipasi dalam pembangunan. Pada saat yang sama, penilaian terhadap kedua program perlu dibedakan antara tujuan normatif dan dampak empiris. Dokumen kegiatan menunjukkan arah, konsep, dan klaim capaian, tetapi belum memuat desain evaluasi yang memungkinkan peneliti mengukur perubahan kesejahteraan, modal sosial, atau ketimpangan. Dengan demikian, hasil ini lebih kuat sebagai bukti orientasi kebijakan inklusif daripada sebagai bukti final efektivitas program.

Empat pola dapat ditarik dari bukti ketiga. Pertama, data demografi digunakan untuk menggeser orientasi kebijakan dari respons umum menuju penetapan kelompok sasaran yang lebih jelas. Kedua, pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia dipakai bersama untuk menghubungkan dimensi ekonomi dan kualitas manusia. Ketiga, program pembangunan dipresentasikan melalui bahasa inklusi, kapabilitas, dan modal sosial,



sehingga pembangunan tidak dibatasi pada indikator fiskal atau infrastruktur. Keempat, terdapat kecenderungan mengaitkan kebijakan lokal dengan konsep global seperti bonus demografi dan pembangunan sebagai perluasan kebebasan. Pola ini menunjukkan bahwa statistik sosial dapat menjadi jembatan antara kondisi penduduk, teori pembangunan, dan desain program. Namun, hubungan tersebut perlu diperkuat melalui data terpilah menurut usia, jenis kelamin, wilayah, pendidikan, pekerjaan, dan kelompok rentan agar istilah “inklusif” dapat diuji. Kesimpulan hasil ketiga ialah bahwa LOGIC 2025 memperlihatkan solusi berbasis data untuk mengarahkan pembangunan generasi muda dan kesejahteraan komunitas, tetapi sekaligus menegaskan kebutuhan evaluasi hasil yang lebih sistematis, partisipatif, dan sensitif terhadap distribusi manfaat.

Discussion

Penelitian ini menganalisis Seminar Internasional LOGIC 2025 sebagai peristiwa pengabdian kepada masyarakat yang mempertemukan statistik sosial, tata kelola data, transformasi digital, kebijakan berbasis bukti, dan kolaborasi pemerintah dengan perguruan tinggi. Tiga hasil utama diperoleh. Pertama, materi Pemerintah Kota Jambi menunjukkan penggunaan data demografi, pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, dan kajian regulasi untuk menjelaskan arah kebijakan serta capaian pembangunan. Kedua, forum menghasilkan penandatanganan perjanjian kerja sama dan pembentukan Laboratorium Kebijakan Pemerintahan, sehingga pertukaran pengetahuan memperoleh kemungkinan tindak lanjut kelembagaan. Ketiga, struktur demografi dan program Kartu Bahagia serta Kampung Bahagia menunjukkan orientasi pembangunan yang menghubungkan bonus demografi dengan inklusi dan kesejahteraan. Secara keseluruhan, temuan memperlihatkan bahwa keberhasilan kegiatan bukan hanya terletak pada penyampaian materi, tetapi pada kemampuan forum membangun bahasa bersama mengenai data, mempertemukan sumber keahlian, dan merancang infrastruktur kolaborasi (Thorpe & Rhodes, 2018). Hasil ini juga menunjukkan batas bukti yang tersedia: naskah mendokumentasikan proses dan keluaran kegiatan, tetapi belum mengukur dampak kebijakan atau perubahan kapasitas peserta secara longitudinal.

Hubungan antara tata kelola data, transformasi digital, kolaborasi akademik, dan kualitas kebijakan dapat dijelaskan melalui proses konversi data menjadi pengetahuan dan tindakan. Data baru memiliki nilai ketika standar, sumber, metode, dan tanggung jawab pengelolaannya jelas. Setelah itu, kapasitas analitis dibutuhkan untuk menafsirkan data menjadi diagnosis masalah. Kepemimpinan kemudian memilih prioritas dan menghubungkannya dengan regulasi, anggaran, serta layanan. Transformasi digital mempercepat aliran informasi, tetapi tidak otomatis memperbaiki kebijakan apabila proses bisnis, keterampilan aparatur, dan tata kelola kelembagaan tidak berubah. Mergel et al



(2019) menunjukkan bahwa transformasi digital sektor publik melibatkan perubahan proses dan hasil organisasi, sedangkan Vial (2019) menempatkan teknologi sebagai pemicu perubahan strategis yang dipengaruhi struktur dan kapabilitas organisasi. Kolaborasi dengan universitas penting karena pemerintah memiliki akses pada masalah dan data administratif, sementara akademisi menyediakan metodologi, kritik, dan evaluasi. Laboratorium kebijakan dapat menjadi ruang yang menjaga hubungan tersebut agar tidak berhenti pada satu kegiatan. Dengan demikian, efek seminar terjadi melalui pembelajaran, legitimasi, komitmen, dan pelembagaan, bukan melalui paparan informasi semata.

Temuan penelitian sejalan dengan OECD (2019) yang menempatkan tata kelola data sebagai fondasi sektor publik berbasis data dan menghubungkan data dengan perumusan kebijakan, pelayanan, manajemen organisasi, serta inovasi. Hasil ini juga konsisten dengan Mergel et al (2019) dan Vial (2019) bahwa transformasi digital bukan sekadar penggunaan teknologi, tetapi perubahan proses, kapasitas, dan penciptaan nilai. Dalam aspek kebijakan, hasil penelitian mendukung Head (2016) yang menekankan perlunya pelembagaan evaluasi dan hubungan antara lembaga pemerintah dengan sumber keahlian nonpemerintah. Persamaannya terletak pada kebutuhan akan tata kelola, kapasitas, dan kolaborasi. Perbedaannya, penelitian terdahulu umumnya mengkaji sistem digital, penggunaan bukti, atau kemitraan sebagai objek terpisah. Studi ini memperlihatkan bagaimana ketiganya bertemu dalam satu kegiatan pengabdian dan bergerak dari penyampaian statistik sosial menuju perjanjian kerja sama serta rencana laboratorium kebijakan. Kebaruannya bukan klaim bahwa seminar langsung meningkatkan kinerja pemerintah, melainkan identifikasi seminar sebagai ruang transisi dari komunikasi pengetahuan menuju institusionalisasi kolaborasi. Temuan ini sekaligus memperlihatkan bahwa keluaran formal perlu dibedakan dari dampak nyata yang baru dapat dinilai melalui evaluasi lanjutan.

Makna hasil penelitian perlu dibaca dalam konteks historis perubahan administrasi publik Indonesia dari birokrasi berbasis dokumen menuju pemerintahan digital dan terintegrasi. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia menuntut pemerintah mengembangkan sistem elektronik serta memperbaiki keterpaduan tata kelola data (Presiden Republik Indonesia, 2019b). Dalam konteks sosial, masyarakat membutuhkan kebijakan yang cepat, transparan, dan sesuai kebutuhan, sementara komposisi penduduk muda menciptakan tekanan agar pemerintah menyediakan pendidikan, pekerjaan, ruang partisipasi, dan layanan digital yang relevan. Dalam konteks ideologis, penggunaan istilah kebijakan berbasis bukti membawa nilai rasionalitas, akuntabilitas, dan efisiensi, tetapi bukti tidak boleh menggantikan pertimbangan keadilan, pengalaman warga, dan proses demokratis. Data selalu dipilih,



dikategorikan, dan ditafsirkan dalam kerangka tertentu. Karena itu, forum pemerintah-akademisi bermakna bukan hanya sebagai validasi kebijakan, tetapi sebagai ruang untuk menguji asumsi, membuka kritik, dan menghubungkan angka dengan kehidupan sosial. Pembentukan laboratorium kebijakan dapat menjadi simbol peralihan dari legitimasi seremonial menuju pembelajaran kelembagaan, selama ruang tersebut menjaga independensi akademik dan keterbukaan publik.

Implikasi hasil penelitian memiliki fungsi sekaligus potensi disfungsi. Secara fungsional, penggunaan data dapat meningkatkan ketepatan sasaran, konsistensi regulasi, transparansi, dan kemampuan mengevaluasi program. Kolaborasi dengan universitas memperluas akses pemerintah terhadap metode penelitian, tenaga ahli, mahasiswa, dan jejaring internasional. Laboratorium kebijakan juga dapat menyediakan ruang eksperimen, evaluasi cepat, serta dokumentasi pembelajaran lintas perangkat daerah. Program yang berangkat dari data demografi berpotensi lebih responsif terhadap kebutuhan generasi muda dan kelompok rentan. Namun, disfungsi dapat muncul apabila angka digunakan hanya untuk membenarkan keputusan yang telah dibuat, kerja sama berhenti pada penandatanganan dokumen, atau laboratorium berubah menjadi simbol tanpa agenda, pendanaan, dan independensi. Digitalisasi juga membawa risiko fragmentasi baru, pelanggaran privasi, ketimpangan akses, dan ketergantungan pada penyedia teknologi apabila tata kelola tidak kuat (Abbas et al., 2019). Selain itu, klaim keberhasilan berbasis indikator agregat dapat menutupi ketimpangan antarkelompok. Refleksi ini menegaskan bahwa kualitas pemerintahan berbasis data harus dinilai melalui keterbukaan metodologi, perlindungan hak, partisipasi warga, dan bukti perubahan layanan, bukan melalui jumlah data atau aplikasi semata.

Rencana aksi perlu diarahkan pada pelembagaan hasil seminar dalam siklus kebijakan Kota Jambi. Pertama, Pemerintah Kota Jambi dan Universitas Jambi perlu menetapkan tata kelola Laboratorium Kebijakan Pemerintahan yang memuat struktur, mandat, pendanaan, independensi, mekanisme akses data, perlindungan privasi, dan indikator kinerja. Kedua, disusun agenda tahunan yang memprioritaskan evaluasi beberapa Peraturan Wali Kota serta program Kartu Bahagia dan Kampung Bahagia menggunakan data dasar, indikator keluaran, hasil, dan distribusi manfaat. Ketiga, laboratorium perlu membangun katalog data dan protokol interoperabilitas yang selaras dengan Satu Data Indonesia, disertai dokumentasi definisi, sumber, periode, dan kualitas data. Keempat, aparatur, dosen, dan mahasiswa dapat mengikuti pelatihan bersama mengenai statistik sosial, visualisasi, evaluasi dampak, dan komunikasi bukti. Kelima, hasil kajian harus dipublikasikan dalam ringkasan kebijakan yang mudah diakses dan dibahas melalui forum warga. Keenam, jejaring internasional perlu diterjemahkan menjadi riset, publikasi, atau pertukaran



keahlian yang terukur. Dengan langkah tersebut, seminar dapat berkembang menjadi mekanisme perbaikan kebijakan yang berkelanjutan, transparan, dan dapat diuji.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, kesimpulan terpenting dari kegiatan ini menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan berbasis data tidak cukup diwujudkan melalui penggunaan teknologi atau penyajian statistik, tetapi memerlukan hubungan yang terintegrasi antara data, kepemimpinan, kapasitas kelembagaan, dan kolaborasi akademik. Seminar Internasional LOGIC 2025 memperlihatkan bahwa statistik sosial dapat digunakan untuk membaca kondisi penduduk, mengevaluasi capaian pembangunan, dan memperkuat dasar penyusunan kebijakan daerah. Pemaparan mengenai lebih dari 300 Peraturan Wali Kota, struktur demografi, pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, serta program Kartu Bahagia dan Kampung Bahagia menunjukkan adanya orientasi menuju kebijakan berbasis bukti dan pembangunan inklusif. Pelajaran utama yang dapat diambil ialah bahwa forum akademik akan memberikan manfaat lebih besar apabila pengetahuan yang dipertukarkan diterjemahkan menjadi mekanisme kerja sama yang nyata. Penandatanganan perjanjian kerja sama dan pembentukan Laboratorium Kebijakan Pemerintahan menjadi langkah penting untuk mengubah seminar dari kegiatan seremonial menjadi ruang riset, evaluasi, dan pembelajaran kebijakan yang berkelanjutan. Dengan demikian, kualitas kebijakan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dan perguruan tinggi mengelola data serta pengetahuan secara bersama.

Kekuatan tulisan ini terletak pada kemampuannya menghubungkan beberapa konsep yang selama ini sering dibahas secara terpisah, yaitu statistik sosial, tata kelola data, transformasi digital, kebijakan berbasis bukti, bonus demografi, pembangunan inklusif, dan kolaborasi pemerintah–perguruan tinggi. Secara empiris, tulisan ini menyumbangkan data mengenai praktik Pemerintah Kota Jambi dalam menggunakan indikator demografi dan pembangunan sebagai dasar penjelasan kebijakan, sekaligus mendokumentasikan keluaran kelembagaan berupa perjanjian kerja sama dan Laboratorium Kebijakan Pemerintahan. Secara konseptual, kegiatan ini dapat dipahami sebagai ekosistem pengetahuan–kebijakan, yakni proses yang menghubungkan produksi data, pemaparan pengalaman pemerintahan, dialog akademik, pembentukan komitmen, dan pelembagaan kerja sama. Pendekatan tersebut memperluas pemahaman tentang pengabdian kepada masyarakat karena kegiatan tidak hanya menghasilkan transfer pengetahuan, tetapi juga membuka ruang penelitian, evaluasi regulasi, penguatan kapasitas aparatur, dan pengembangan jejaring internasional. Tulisan ini juga memunculkan pertanyaan baru mengenai sejauh mana laboratorium kebijakan mampu meningkatkan kualitas regulasi, transparansi penggunaan data,



keterlibatan masyarakat, dan keberlanjutan hubungan antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi.

Keterbatasan tulisan ini terutama berkaitan dengan sifat data yang berpusat pada satu kegiatan seminar dan dokumentasi keluaran awal. Analisis belum mengukur perubahan pengetahuan peserta sebelum dan sesudah kegiatan, belum menggunakan survei, wawancara mendalam, atau diskusi kelompok terarah, serta belum menilai secara langsung dampak kebijakan yang dipaparkan terhadap masyarakat. Data mengenai lebih dari 300 Peraturan Wali Kota, pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, struktur demografi, dan program pembangunan digunakan sebagaimana disampaikan dalam kegiatan, tetapi belum diverifikasi melalui evaluasi setiap regulasi, data penerima manfaat, atau pengukuran perubahan kesejahteraan. Penelitian ini juga belum menjelaskan secara rinci struktur organisasi, pendanaan, agenda riset, mekanisme akses data, dan indikator kinerja Laboratorium Kebijakan Pemerintahan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu menggunakan desain longitudinal, metode campuran, evaluasi dampak, dan studi komparatif antardaerah. Kajian lanjutan juga perlu menilai keberlanjutan kerja sama, kualitas interoperabilitas data, perlindungan privasi, partisipasi masyarakat, serta sejauh mana rekomendasi akademik benar-benar digunakan dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan Pemerintah Kota Jambi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Abbas, A., Avdic, A., Xiaobao, P., Hasan, M. M., & Ming, W. (2019). University-government collaboration for the generation and commercialization of new knowledge for use in industry. *Journal of Innovation and Knowledge*, 4(1), 23–31. <https://doi.org/10.1016/j.jik.2018.03.002>
2. Bappenas & UNFPA. (2023). Penduduk berkualitas menuju Indonesia emas 2045. In Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas. https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/Policy_Paper/Buku
3. Head, B. W. (2016). Toward More “Evidence-Informed” Policy Making? *Public Administration Review*, 76(3), 472–484. <https://doi.org/10.1111/puar.12475>
4. Kemenko, P. M. K. (2024). Panduan implementasi kolaborasi pentahelix dalam pembangunan daerah. In Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
5. Klievink, B., Romijn, B. J., Cunningham, S., & de Bruijn, H. (2017). Big data in the public sector: Uncertainties and readiness. *Information Systems Frontiers*, 19(2), 267–283. <https://doi.org/10.1007/s10796-016-9686-2>



6. Mergel, I., Edelmann, N., & Haug, N. (2019a). Defining digital transformation: Results from expert interviews. *Government Information Quarterly*, 36(4), 101385. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.06.002>
7. Mergel, I., Edelmann, N., & Haug, N. (2019b). Defining digital transformation: Results from expert interviews. *Government Information Quarterly*, 36(4), 101385. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.06.002>
8. OECD. (2019). The Path to Becoming a Data-Driven Public Sector. OECD Publishing. In *The Path to Becoming a Data-Driven Public Sector*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/059814a7-en>
9. OECD. (2020). The OECD Digital Government Policy Framework: Six dimensions of a Digital Government (OECD Public Governance Policy Papers). OECD Publishing, 02(02). <https://doi.org/10.1787/f64fed2a-en>
10. Parkhurst, J. (2016). The Politics of Evidence: From evidence-based policy to the good governance of evidence. In *The Politics of Evidence: From Evidence-Based Policy to the Good Governance of Evidence*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315675008>
11. Pemerintah Pusat. (2023). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. In *Peraturan Presiden Republik Indonesia*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/273981/perpres-no-82-tahun-2023>
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. (2018). Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. In *Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia* (p. 110).
13. Presiden Republik Indonesia. (2019a). Peraturan Presiden (PerPres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. In *Peraturan Presiden* (Issue 004185, pp. 1–35). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/108813/perpres-no-39-tahun-2019>
14. Presiden Republik Indonesia. (2019b). *Perpres Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia*. Sekretariat Negara Republik Indonesia. [https://peraturan.bpk.go.id/Download/99827/Perpres Nomor 39 Tahun 2019.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/99827/Perpres%20Nomor%2039%20Tahun%202019.pdf)
15. Suazo-Galdames, I. C., Saracostti, M., & Chaple-Gil, A. M. (2025). Scientific evidence and public policy: a systematic review of barriers and enablers for evidence-informed decision-making. *Frontiers in Communication*, 10, 1632305. <https://doi.org/10.3389/fcomm.2025.1632305>
16. Thorpe, A., & Rhodes, S. (2018). The Public Collaboration Lab—Infrastructuring



Redundancy with Communities-in-Place. *She Ji*, 4(1), 60-74.
<https://doi.org/10.1016/j.sheji.2018.02.008>

17. Vial, G. (2019). Understanding digital transformation: A review and a research agenda. *Journal of Strategic Information Systems*, 28(2), 118-144.
<https://doi.org/10.1016/j.jsis.2019.01.003>
18. W. Cresswell, J., & N. Poth, C. (2017). *Qualitative Inquiry and Research Design Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
19. World Bank. (2021). World Development Report 2021: Data for Better Lives. In *World Development Report 2021: Data for Better Lives*. World Bank.
<https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1600-0>
20. Yin K. Robert. (2018). Case Study Research and Design and Methods. In *SAGE Publications* (6th ed., Vol. 5). SAGE Publications.

